

Krisis Air Bersih, Warga di Sikka Minum Air dari Batang Pisang

SIKKA (IM)- Dampak musim kemarau panjang, membuat warga di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur terpaksa minum air dari batang pisang karena tidak mampu membeli air.

Krisis air minum bersih membuat ratusan warga di RT 013 RW 006 Dusun Klotong, Desa Bura Bekor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpaksa mengonsumsi air dari batang pohon pisang. Selama ini, warga di Dusun Klotong, Desa Bura Bekor hanya mengandalkan air hujan untuk ditampung guna memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau.

Minimnya curah hujan tahun ini menyebabkan warga di desa terpaksa mengambil air dari batang pohon pisang. Mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan air guna kebutuhan rumah tangga. Untuk mendapatkan air batang pisang secukupnya, warga terpaksa menebang beberapa pohon pisang di kebun dekat pekarangan rumah. Pohon-pohon pisang tersebut ditebang, lalu dibuatkan lubang pada pangkal pisang agar dapat menampung air.

Agar dapat menampung air secukupnya, batang pisang yang sudah dilubangi ditutup kembali dengan kulit pisang dan

daun pisang hingga satu hari lamanya.

Hingga air dalam batang pisang yang sudah dilubangi dengan gayung, dimasukkan ke dalam ember kemudian dibawa pulang ke rumah untuk dimasak dan dikonsumsi. Dalam sehari, warga biasanya menebang empat sampai lima pohon pisang untuk bisa mendapatkan air pisang sebanyak 2 hingga 2,5 liter air untuk dikonsumsi.

Warga melakukan ini karena tak mampu membeli air tangki. Untuk membeli air bersih warga harus merogoh kocek hingga Rp 250.000 untuk mendapatkan satu tangki air ukuran 5.000 liter. Warga yang tidak mampu membeli air, terpaksa mengonsumsi air dari batang pohon pisang.

Menurut warga, di wilayah tersebut masih ada satu sumber mata air. Namun, jaraknya dari rumah penduduk mencapai 8 kilometer sehingga warga kesulitan untuk mengambilnya. Warga mengharapkan kepada pemerintah untuk membantu mendistribusikan air minum bersih. Sebab, warga sangat kesulitan mendapatkan air minum bersih. ● pra

Memutus Mata Rantai Penularan TB Melalui Terapi Obat Pencegahan



Memutus mata rantai penularan Tuberkulosis melalui terapi obat pencegahan TB.

BOGOR (IM)- Masyarakat Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor di edukasi cara pengobatan penyakit Tuberkulosis (TBC) melalui Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

Hal ini bertujuan menurunkan angka penularan, kesakitan dan kematian akibat TBC. Oleh tim United States Agency for International Development (USAID) kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam hal ini Puskesmas Cibungbulang dan Pemerintah Kecamatan Cibungbulang, yang berlangsung di Aula Kantor Desa Cimanggu I, Selasa (3/10).

District Officer for Advocacy and Partnership (DAPO) Bogor USAID, Prevent Serli, mengajak masyarakat berkomitmen menjadi kepanjangan tangan USAID menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, keluarga dan kerabat bahwa TBC bisa dicegah dengan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

Mari kita kompak memberikan dukungan, bahwa TBC bisa diobati melalui terapi obat. Dengan sosialisasi ini kami fokus kepada menemukan dan mengobati sampai sembuh," ungkap Serli.

Kemudian, Kasi Pendidikan Kesehatan Kecamatan Cibungbulang, Ridwan menambahkan bahwa, penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis yang sangat menular salah satunya melalui droplet yang terhirup dari udara. Sehingga perlu kesadaran masyarakat yang tinggi untuk bersama-sama melakukan pencegahan.

Artinya masyarakat tidak merasa malu dan mengangap aib ketika ada anggota keluarga, kerabat dan masyarakat di wilayahnya positif TB untuk melaporkan dan membawanya berobat ke Puskesmas. Sehingga tidak lagi ada yang tertular terutama keluarga yang kontak erat dengan positif Tuberkulosis.

"Mari kita bersama-sama cegah penularan dengan obat pencegahan atau Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) jaga diri kita keluarga dan masyarakat agar tetap sehat terhindar dari TB," tegas Ridwan.

Selanjutnya, petugas kesehatan Puskesmas Cibungbulang, Pajri menjelaskan bahwa penurunan angka penularan penyakit Tuberku-

losis saat ini tengah gencar dilakukan mengingat negara Indonesia urutan ke dua penderita TB tertinggi di dunia. Salah satunya melalui Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yakni pengobatan pencegahan rutin baik bagi masyarakat sehat yang kontak erat dengan penderita positif TB. Karena menurutnya pemberian TPT dapat mengurangi risiko seseorang yang tinggal serumah dengan positif TB sekitar 60 sampai 90%.

Dengan obat pencegahan ini, dapat memutus mata rantai penularan akibat bakteri TB dari penderita positif TB. Dengan TPT ini penderita TB sembuh 100 persen, keluarga kontak erat dan masyarakat juga terbebas dari TB, baik masyarakat Kabupaten Bogor secara umum dan khususnya di Desa Cimanggu Satu ini," tutur Panjri.

Di tempat yang sama Kepala Desa Cimanggu I, Hermawan M. Sodik menyampaikan, apresiasi kepada Pemkab Bogor juga USAID yang telah mendukung masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik bagaimana cara mencegah ketertularan penyakit Tuberkulosis melalui Terapi Pencegahan Tuberkulosis atau terapi obat pencegahan.

"Kami sangat mendukung terapi obat pencegahan tuberkulosis ini, karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Sehingga kita bisa mendiagnosa dan melihat struktur kesehatan warga Desa Cimanggu I. Tentunya kami siap menjadi kader TPT," ungkap Kades Cimanggu I.

Terakhir, penyintas positif Tuberkulosis, Dandang Jatnika mengajak masyarakat untuk aware dan mau berobat jika dinyatakan positif Tuberkulosis dengan pengobatan rutin tuberkulosis dapat sembuh total hingga 100 persen dan tidak tertular TBC.

"Saya tertular dari salah satu keluarga yang positif TB. Terapi obat ini tentunya butuh dukungan keluarga sebagai pengawas penelakan obat agar tidak terlewat dan bisa sembuh total. Saya sangat berterimakasih kepada keluarga, Pemkab Bogor juga tetangga yang telah mendukung penuh kesembuhan saya," tukas Dandang. ● gio

8 | Nusantara



OPERASI KATARAK GRATIS DI BANDUNG

Dokter spesialis mata melakukan operasi katarak pasien di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/10). Dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia, Kementerian BUMN menggelar operasi katarak gratis bagi 25 penderita katarak serta pemeriksaan mata gratis bagi 100 orang warga.

DLH Kabupaten Bogor: Pelaku Usaha Cemari Sungai Cileungsi

Selain limbah industri, penyebab pencemaran juga terjadi dari limbah rumah tangga. Terbukti banyaknya sampah-sampah plastik yang berada di sepanjang aliran sungai ini, kata Kepala Bidang Penegakan Hukum DLH Provinsi Jabar, Nita Nilawati Wala.

CIBINONG (IM)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa penyebab pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi adalah pelaku usaha. Temuan ini diketahui

setelah DLH Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat kembali melakukan susur sungai untuk mencari titik pencemaran. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari jembatan Wika hingga ke jembatan Wanaherang, Gunung

Putri yang menjadi lokasi awal perubahan warna air.

Dari hasil temuan di lapangan, pencemaran sungai itu disebabkan oleh pelaku usaha, baik yang berskala industri besar maupun rumah tangga yang sama-sama membuang limbahnya ke aliran sungai. Oleh petugas, beberapa saluran pembuangan limbah ini pun langsung diuji kadar airnya, tetapi hanya menggunakan satu parameter dari 32 parameter.

Selain limbah industri, penyebab pencemaran juga terjadi dari limbah rumah tangga. Terbukti banyaknya sampah-sampah plastik yang

berada di sepanjang aliran sungai ini.

"Kita susur sungai untuk mengidentifikasi masalah di kali Cileungsi. Temuannya, pertama kegiatan pelaku usaha yang membuang limbah di sungai ini menjadi sorotan kita. Kedua sampah domestik yang jadi perhatian. Ketiga perilaku masyarakat," kata Kepala Bidang Penegakan Hukum DLH Provinsi Jabar, Nita Nilawati Wala.

Menurut Nita, posisi sungai juga perlu direvitalisasi dan seharusnya ada rencana aksi yang disusun bersama seperti program Citarum Harum. Pihaknya akan menjatuhkan

sanksi pidana terhadap perusahaan yang mencemari Sungai Cileungsi.

Nita menambahkan dari sisi penegakan hukum, pihak DLH Kabupaten, DLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi administratif kepada 34 pelaku usaha serta sanksi pidana ke tiga perusahaan sejak Maret 2023 lalu. Meski demikian, DLH mengaku perlu upaya bersama dari semua pihak terkait untuk membuat program bersama agar pencemaran Sungai Cileungsi bisa tuntas seperti Sungai Citarum. ● pra

Pemkab Bogor Dorong Kesetaraan Gender

BOGOR (IM)- Dorong terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lakukan evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Sebagai upaya persiapan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang dikemas melalui kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2023, di Hotel Bale Arimbi Megamendung, Kabupaten Bogor, selama dua hari, Selasa-Rabu (3-4/10).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menginstruksikan kepada pemerintah di seluruh hirarki dan lembaga untuk mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman baik laki-laki maupun perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan sangat penting dilakukan.

Kabag Kesra Setda Kabupaten Bogor, Pedri Hariyanto mengungkapkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah mendukung upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor dan

Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

"Komitmen ini menjadi dasar pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bogor untuk mencapai kabupaten yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan," ujarnya.

Menurutnya, indikator atas keberhasilan implementasi PUG tidak hanya melalui angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) saja, melainkan juga adanya legitimasi melalui Anugerah Parahita Ekapraya sebagai bentuk legitimasi atau pengakuan atas komitmen kepala daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengarusutamaan gender.

"Evaluasi PUG dan penilaian administrasi kegiatan tahun 2021 dan 2022 akan dilaksanakan tahun ini yang telah diawali dengan evaluasi mandiri pada tanggal 18 September s/d 13 Oktober 2023," bebernya.

Sehingga dibutuhkan data-data pendukung dari perangkat daerah dan stakeholder lintas sektoral untuk eviden pengisian aplikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara online.

Untuk itu saya minta semua perangkat daerah di

lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, agar turut mendukung dan berpartisipasi untuk kelancaran proses penilaian Anugerah Parahita Ekapraya tingkat nasional. Seluruh perangkat daerah agar saling bekerjasama memenuhi kebutuhan data terkait indikator penilaian.

"Saya harap rakor ini dapat membangun sinergi yang harmonis antar perangkat daerah sehingga seluruh perangkat daerah memahami dengan baik tugas dan fungsi serta perannya sesuai dengan batasan kewenangannya masing-masing," tuturnya.

Ketua Panitia Iif Rifanudin menyatakan, kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan sosial tingkat Kabupaten Bogor tahun 2023 antara lain, meningkatkan pemahaman perangkat daerah tentang revitalisasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang mencakup lomba gerakan PUG dan tujuh proses pembangunan.

Kemudian, meningkatkan pemahaman perangkat daerah tentang evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender pada Pemerintah Kabupaten Bogor. "Serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan seluruh perangkat daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pengarusutamaan kesetaraan gender," tukas Iif. ● gio

Bupati Bogor Ingin Bangun Pasar dan Poned di Sukajaya



Bupati Bogor, Iwan Setiawan ingin membangun pasar dan poned di Sukajaya.

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan didampingi Ketua TP- PKK Kabupaten Bogor, Halima-tussadiyah Iwan kembali melakukan kegiatan Bogor Kelling (Boling) untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melihat langsung hasil pembangunan di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Rabu (4/10).

Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor, Iwan Setiawan ingin meningkatkan sarana publik yang optimal di wilayah Kecamatan Sukajaya salah satunya membangun pasar dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) atau rawat inap di Puskesmas wilayah Sukajaya.

"Untuk layanan kesehatan di sini masih ada kekurangan, salah satunya pelayanan Poned atau rawat inap di Puskesmas. Insya Allah pak kades dan pak camat dis ini hadir dari Puskesmas mudah-mudahan dicatat agar masyarakat lebih mudah dan dekat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," terang Iwan Setiawan.

Bupati Bogor menambahkan bahwa, keberadaan pasar juga penting bagi masyarakat Sukajaya untuk memudahkan akses ekonomi masyarakat. Karena menurutnya kemudahan aksesibilitas nomor satu dalam pembangunan baik itu aksesibilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Yang urgen-urgen tolong pak camat tuntaskan yaitu Poned dan pasar supaya warga ini tidak perlu jauh dan ke mana-mana. Ini penting karena kalau menurut saya di wilayah itu aksesibilitas nomor satu bagi masyarakat untuk memberikan berbagai kemudahan," tegasnya.

Iwan Setiawan juga menerangkan akan menyelesaikan 3.100 pembangunan hunian tetap (Huntau) bagi masyarakat korban bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah Sukajaya tahun 2020 lalu. "Ini amanah rakyat Insya Allah 3.100 akan diselesaikan 2023," ungkap Bupati Bogor.

Di tempat yang sama, Camat Sukajaya Rosidin menyatakan terimakasih kepada Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang telah hadir ditengah-tengah warga masyarakat Sukajaya. "Tentunya dapat mendorong program kegiatan pembangunan di wilayah Sukajaya dan menjadi salah satu keberhasilan program pembangunan Kabupaten Bogor di wilayah Sukajaya, khususnya di bidang jalan dan jembatan termasuk hunian tetap. "Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Bogor. Alhamdulillah warga Sukajaya hari ini bisa menikmati Huntau yang selama ini kita nantikan," tandasnya. ● gio



Untuk mendorong wujudkan kesetaraan gender, Pemkab Bogor akan mengevaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG). (dok)